

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB)**

Di negara-negara berkembang, yang sering juga dinamakan “Dunia Ketiga” konsep Produk Domestik Bruto adalah konsep yang paling penting jika dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Menurut Sukirno (2013:34) dalam bukunya makroekonomi teori pengantar, Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu.

Produk Domestik Bruto atau dalam bahasa Inggrisnya *Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dan negara asing. (Sukirno, 2013:35)

Produk Domestik Bruto atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan pada harga tetap yaitu

harga yang berlaku pada tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain.

Menurut Mankiw (2007:17), tujuan Produk Domestik Bruto adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

Ada dua cara dalam melihat statistik ini. Salah satunya adalah dengan melihat Produk Domestik Bruto sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain untuk melihat Produk Domestik Bruto adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Dari kedua sudut pandang, jelaslah mengapa Produk Domestik Bruto merupakan cerminan dari kinerja ekonomi. Produk Domestik Bruto mengukur sesuatu yang dipedulikan banyak orang. Demikian pula, perekonomian dengan output barang dan jasa yang besar bisa secara baik memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah (Mankiw, 2007:17).

Menurut Sadono Sukirno (2013:33), untuk menghitung nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan oleh sesuatu perekonomian ada tiga cara perhitungan yang dapat digunakan, yaitu:

- i. Cara Pengeluaran. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran/perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut.

- ii. Cara produksi atau cara produk neto. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian.
- iii. Cara pendapatan. Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (2017) untuk menghitung angka-angka Produk Domestik Bruto ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu (biasanya satu tahun).

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, Produk Domestik Bruto mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

### 3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba; pengeluaran konsumsi pemerintah; pembentukan modal tetap domestik bruto; perubahan inventori; dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

#### **2.1.1.1 Kegunaan Data Produk Domestik Bruto**

Menurut buku pedoman Badan Pusat Statistik (2014), data Produk Domestik Bruto adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian negara setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain dapat disebutkan berikut ini:

1. Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai Produk Domestik Bruto yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atas peranan setiap lapangan usaha dalam suatu negara. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.

4. Produk Domestik Bruto per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto per kepala atau per satu orang penduduk.
5. Produk Domestik Bruto per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

#### **2.1.1.2 Teori Produksi Pada Perhitungan Produk Domestik Bruto**

Menurut Mankiw (2007: 46), output barang dan jasa suatu perekonomian (GDP) bergantung pada (1) jumlah input atau faktor-faktor produksi dan (2) kemampuan mengubah input menjadi output sebagaimana ditunjukkan dalam fungsi produksi. Faktor produksi (*factors of production*) adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dua faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja. Modal adalah seperangkat sarana yang dipergunakan oleh para pekerja: derek para pekerja bangunan, kalkulator akuntan dan komputer *PC*. Tenaga kerja adalah waktu yang dihabiskan orang untuk bekerja. Simbol *K* untuk menunjukkan jumlah modal dan simbol *L* untuk menunjukkan jumlah tenaga kerja. Faktor-faktor produksi dianggap sudah baku. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa perekonomian memiliki sejumlah modal dan sejumlah tenaga kerja tetap. Fungsi produksi mencerminkan teknologi yang digunakan untuk mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output.

Perhitungan Produk Domestik Bruto dengan pendekatan produksi didasarkan pada fungsi *Cobb-Douglas*. Fungsi produksi *Cobb-Douglas* menyatakan bahwa pendapatan nasional yang dibagi diantara tenaga kerja dan modal adalah tetap konstan selama periode panjang. Fungsi produksi Cobb-

Douglas memiliki skala hasil konstan, yaitu jika tenaga kerja dan modal meningkat dalam proporsi yang sama, maka output akan meningkat menurut proporsi yang sama pula (Mankiw, 2007:55).

Fungsi produksi *Cobb-Douglas* adalah:

$$Q=f(K,L)$$

Persamaan ini menghubungkan jumlah keluaran dari jumlah kedua masukan yakni modal dan tenaga kerja. *Cobb-Douglas* adalah salah satu fungsi produksi yang paling sering digunakan dalam penelitian empiris. Fungsi ini juga meletakkan jumlah hasil produksi sebagai fungsi dari modal (*capital*) dengan faktor tenaga kerja (*labour*). Dengan demikian dapat pula dijelaskan bahwa hasil produksi dengan kuantitas atau jumlah tertentu akan menghasilkan taraf pendapatan tertentu pula. Secara sederhana fungsi produksi *Cobb-Douglas* tersebut dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Q= AL^{\alpha}K^{\beta}$$

Dimana Q adalah output dan L dan K masing-masing adalah tenaga kerja dan barang modal. A,  $\alpha$  (alpha) dan  $\beta$  (beta) adalah parameter-parameter positif yang dalam setiap kasus ditentukan oleh data. Semakin besar nilai A, barang teknologi semakin maju. Parameter  $\alpha$  mengukur persentase kenaikan Q akibat adanya kenaikan satu persen L sementara K dipertahankan konstan. Demikian pula parameter  $\beta$ , mengukur persentase kenaikan Q akibat adanya kenaikan satu persen K sementara L dipertahankan konstan. Jadi  $\alpha$  dan  $\beta$ , masing-masing merupakan elastisitas output dari modal dan tenaga kerja. Jika  $\alpha + \beta = 1$ , maka terdapat

tambahan hasil yang konstan atas skala produksi, jika  $\alpha + \beta > 1$ , maka terdapat tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi dan jika  $\alpha + \beta < 1$ , maka terdapat tambahan hasil yang menurun atas skala produksi pada fungsi produksi *Cobb-Douglas*.

Kajian makroekonomi dan pengembangan secara khusus menggunakan dua faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, yang secara implisit mempersamakan lahan atau tanah dengan modal. Tanah dan modal berbeda secara intrinsik karena modal dapat terakumulasi, sementara tanah tidak.

Fungsi produksi *Cobb-Douglas* dapat juga dipakai untuk menganalisis produktivitas tenaga kerja. Fungsi produksi *Cobb-Douglas* dapat ditunjukkan pada persamaan berikut:

$$Q = f(K,L) \text{ atau}$$

$$Q = AK^\alpha L^\beta$$

Dimana :

Q = Output

A = Konstanta

K = Kapital

L = Labour (tenaga kerja)

$\alpha$  = Koefisien kapital

$\beta$  = Koefisien tenaga kerja

### **2.1.1.3 Produk Domestik Bruto Sektor Perikanan**

Sektor perikanan termasuk ke dalam sektor yang ikut menyumbang terhadap besarnya Produk Domestik Bruto Indonesia yang merupakan subsektor dari sektor Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan. Pada dasarnya, sumbangan sektor Perikanan terhadap Produk Domestik Bruto berasal dari output kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Dalam data Badan Pusat Statistik, sektor perikanan terbagi lagi ke dalam sub, meliputi sektor perikanan budidaya dan sektor perikanan tangkap.

### **2.1.2 Produksi Perikanan**

Menurut Lia Amaliawati (2014:165) produksi adalah setiap kegiatan yang dapat meningkatkan *utility* (nilai guna) suatu barang. Bentuk-bentuk kegiatannya meliputi:

1. *From changing activity*, yaitu kegiatan mengubah bentuk dari suatu barang.
2. *Transportation*, yaitu kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain.
3. *Storage*, yaitu kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan datang.
4. *Merchandising*, yaitu kegiatan memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan.
5. *Personal service*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang orang lain mengakui keberadaannya.

Semua kegiatan tersebut akan dikatakan produksi jika kegiatan tersebut dapat menambah nilai guna dari objek yang dilakukannya. Teori produksi pada prinsipnya menjelaskan hubungan antara jumlah output maksimum yang bisa diproduksi dengan menggunakan sejumlah input-input yang tersedia pada tingkat teknik tertentu.

Menurut Badan Pusat Statistik, produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.

Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olahraga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang terkena racun, pencemaran atau penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budidaya.

#### **2.1.2.1 Perikanan**

Menurut Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Menurut *Lackey*, perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai penggunaan sumber daya tersebut. Dari komponen – komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan (Akhmad Fauzi, 2010).

*Lackey* mengelompokkan perikanan berdasarkan beberapa sifat, di antaranya :

- a. Perikanan berdasarkan jenis lingkungan. Contohnya : perikanan air tawar, perikanan laut, perikanan danau, perikanan sungai dan perikanan bendungan.
- b. Perikanan berdasarkan metode permanen. Contohnya : perikanan trawl, perikanan dipnet, perikanan purse seine dan lain sebagainya.
- c. Perikanan berdasarkan jenis akses yang diinginkan. Contohnya : perikanan akses terbuka, perikanan akses terbuka dengan regulasi dan perikanan dengan akses terbatas.
- d. Perikanan berdasarkan *concern organisme*. Contohnya : perikanan salmon, perikanan udang, perikanan kepiting, perikanan tuna dan lain sebagainya.
- e. Perikanan berdasarkan derajat kealaman dari hewan target. Contohnya : hewan target total dari alam, hewan target semi budi daya atau total budidaya.

Kegiatan sektor perikanan mencakup dua sektor, yaitu sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sektor perikanan budidaya terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya karamba, budidaya jaring apung, budidaya jaring tancap, budidaya sawah. Sektor perikanan tangkap terdiri dari perikanan laut dan umum.

a. Perikanan Budidaya

Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang di lakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Kegiatan budidaya merupakan inti dari usaha tani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil.

Perikanan budidaya menurut Undang–undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

b. Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar yang meliputi laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor–faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Perikanan tangkap juga ada di danau dan di sungai.(Akhmad Fauzi, 2010).

### 2.1.3 Investasi

Menurut Paul A. Samuelson dan William Nordhaus (2006:145) dalam bukunya yang berjudul “Makro Ekonomi”, investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penanam modal (investor) yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi, dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi.

Rudiger (2008:339) menyatakan bahwa investasi menghubungkan masa kini dengan masa depan. Investasi menghubungkan pasar uang dengan pasar barang. Investasi juga merefleksikan penyesuaian stok modal yang ada terhadap permintaan modal. Dan fluktuasi investasi berpengaruh besar pada siklus bisnis.

Sadono Sukirno (2016:121) menyatakan investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan juga sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Tambahan stok barang modal adalah sebesar pengeluaran investasi satu periode sebelumnya. Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto, memiliki pengaruh yang nyata terhadap

perekonomian suatu daerah. Semakin besar investasi maka akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai suatu daerah.

### **2.1.3.1 Jenis-jenis Investasi**

Menurut Bada Koordinasi Penanaman Modal (2004) pada dasarnya investasi dibedakan menjadi investasi finansial dan investasi non finansial.

- a) Investasi finansial adalah bentuk pemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, tabungan, deposito, modal dan penyertaan, surat berharga, obligasi dan sejenisnya.
- b) Investasi non finansial direalisasikan dalam bentuk investasi fisik (investasi riil) yang berwujud *capital* atau barang modal, termasuk di dalamnya inventori/persediaan.

Menurut Sadono Sukirno (2013: 121,122) dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran yang berikut:

- i. Pembelian berbagai jenis modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- ii. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.

- iii. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

### **2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi**

Pendapatan nasional bisa naik atau turun karena perubahan investasi. Kondisi ini tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor lainnya.

Menurut Sadono Sukirno (2013:122), disamping ditentukan oleh harapan di masa depan untuk memperoleh untung, beberapa faktor lain juga penting peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah:

- i. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
- ii. Suku bunga.
- iii. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
- iv. Kemajuan teknologi.
- v. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
- vi. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan

Sedangkan beberapa faktor domestik yang menghambat iklim investasi adalah sebagai berikut (BKPM, 2004):

- 1) Prosedur yang panjang dan berbelit. Sebagai contoh untuk memulai usaha di bidang perdagangan diperlukan tidak kurang dari 46 surat izin dari

berbagai tingkat pemerintahan. Berdasarkan telaah Bank Dunia (2003) terhadap peraturan perundangan yang ada, dibutuhkan sekitar 11 prosedur pokok untuk memulai usaha di Indonesia yang memakan waktu 168 hari atau hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan dengan rata-rata negara Asia Timur lainnya yaitu sekitar 66 hari. Prosedur yang panjang dan berbelit tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan nasional seperti dalam bentuk penciptaan lapangan kerja.

- 2) Tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah di bidang investasi serta kebijakan antar sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi. Di samping itu juga terdapat keragaman yang besar dari kebijakan investasi antar daerah. Kesemuanya ini mengakibatkan ketidakjelasan kebijakan investasi nasional yang pada gilirannya akan menurunkan minat investasi. Salah satu contoh tumpang tindih kebijakan antar sektor adalah pelarangan kegiatan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Di samping pemerintah bisa menghadapi gugatan dari investor yang telah mendapatkan izin penambangan yang lebih memprihatinkan adalah belum tumbuhnya pemahaman yang mendalam antara kepentingan jangka panjang dengan kepentingan jangka pendek yang sebenarnya terkait erat satu sama lain.

- 3) Kurangnya kepastian hukum dengan berlakunya perumusan RUU Penanaman Modal dan lemahnya penegakkan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga.
- 4) Kurang kondusifnya pasar tenaga kerja. Menurunnya penciptaan lapangan kerja per satuan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keengganan perusahaan untuk memanfaatkan tenaga kerja. Secara singkat terdapat dua masalah ketenagakerjaan yang mempengaruhi minat investasi yaitu: (a) kecenderungan peningkatan upah minimum yang tinggi dan besarnya biaya-biaya non UMP serta (b) ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja. Kedua masalah ini mengakibatkan biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja tidak saja tinggi, tetapi juga sulit untuk diperkirakan.
- 5) Meskipun sejak tahun 2001 stabilitas keamanan nasional relatif membaik, keamanan di daerah sehingga penanaman modal cenderung menghindari dari daerah-daerah yang rawan konflik seperti Aceh, Maluku dan Papua. Meningkatnya gangguan keamanan, meskipun bersifat lokal, dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional yang pada gilirannya akan mengakibatkan kekuatiran investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau menunda realisasi dari rencana investasinya.
- 6) Kurangnya insentif investasi, termasuk insentif perpajakan dalam menarik penanaman modal di Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara lain, insentif perpajakan di Indonesia relatif tertinggal. Meskipun dengan

tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) untuk jangka waktu tertentu dan relatif tertinggal dalam memberikan kelonggaran pajak (*tax allowances*).

Pengairan iklim investasi di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua undang-undang ini kemudian dilengkapi dan disempurnakan, dimana UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanama Modal Asing disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1970.

Adapun kriteria penanaman modal yang mendapat fasilitas menurut Pasal 18 UU. No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja.
- b. Termasuk skala prioritas tinggi.
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur.
- d. Melakukan alih teknologi.
- e. Melakukan industri pionir.
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu.

- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatanyang diproduksi di dalam negeri.

#### **2.1.4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang no.25 tahun 2007 tentang penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam Modal dalam negeri menurut UU tersebut adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Adapun dalam undang-undang no.6 tahun 1968 dan undang-undang no.12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dijelaskan bahwa modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan

dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa, yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan penanaman modal dalam negeri ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Menurut Wiranata (2004:18) dasar pertimbangan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Modal merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan kemampuan dan kesanggupan bangsa Indonesia itu sendiri.
- b) Perlunya dilakukan pemupukan modal dan pemanfaatan modal dalam negeri dan membuka kesempatan bagi pengusaha swasta seluas-luasnya.
- c) Perlunya pemanfaatan modal dalam negeri yang dimiliki pihak asing dan menetapkan batas waktu usaha bagi perusahaan asing di Indonesia yang menggunakan modal dalam negeri.

Pengembangan investasi-investasi daerah dalam memacu pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri, sangat penting untuk ditingkatkan sebab Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan bentuk arus modal yang berasal dari dalam negeri sehingga dengan meningkatnya Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan investor-investor dalam negeri dapat bersaing dengan investor asing dalam kontribusinya meningkatkan perekonomian.

### **2.1.5 Penanaman Modal Asing (PMA)**

Investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Pasal 1 ayat 3 UU no. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Adapun menurut UU no. 1 Tahun 1967 dan UU no. 11 Tahun 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Salvatore dan Dowling menyatakan (1977:185), bahwa investasi asing dapat langsung atau portofolio. Investasi langsung melibatkan kontrol manajerial. Investasi portofolio mengacu pada pembelian sekuritas dan tidak melibatkan asing untuk mengontrol perusahaan.

Wiranata (2004:45) berpendapat bahwa investasi dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka pada umumnya memerlukan investasi

asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor.

Modal asing dapat memasuki suatu negara dalam bentuk modal swasta dan/atau modal negara. Modal asing swasta dapat mengambil bentuk bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung berarti bahwa perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* atau *de jure* melakukan pengawasan atas aset (aktiva) yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi itu. Investasi langsung dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal, pembentukan suatu perusahaan dalam mana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham, pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara penanam modal, mendirikan suatu koperasi di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain, atau menaruh aset (aktiva) tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal.

Penanaman Modal Asing menurut Suyatno (2009:72) adalah suatu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Penanaman Modal Asing terdiri atas:

- a. Investasi Portofolio (*portfolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dari mata uang nasional. Kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui

lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiunan dan sebagainya.

- b. Investasi asing langsung (*foreign direct investment*), merupakan Penanaman Modal Asing yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi dan, dan sebagainya.

Investasi asing langsung sangat penting peranannya bagi perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu sumber untuk peningkatan devisa negara, investasi asing langsung juga berfungsi sebagai transfer teknologi, keterampilan manajemen dan lapangan kerja baru. Investasi asing langsung juga memberikan beberapa kelebihan, antara lain yaitu investasi asing lebih memberikan rasa aman bagi negara yang menjadi tuan rumah dari resiko-resiko yang terjadi akibat perkembangan perekonomian kotemporer yang sering kali dramatis, terutama akibat perubahan apresiasi uang (Kuncoro, 2011:128).

Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki peran makro maupun mikro dalam suatu perekonomian. Secara Makro, Penanaman Modal Asing berperan penting dalam upaya meningkatkan kegiatan investasi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Secara mikro, Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap ketenagakerjaan, penguasaan dan pendalaman teknologi, dan terhadap pengembangan keterkaitan antar industri di dalam negeri (*domestic linkages*) termasuk akses industri dalam negeri terhadap jaringan produksi, perdagangan, dan investasi regional/global.

Menurut Salvatore dan Dowling (1977:186), manfaat bagi negara berkembang dari investasi asing langsung swasta dapat diakibatkan oleh: (1) upah riil yang lebih tinggi bagi pekerja lokal dan / atau kesempatan kerja yang lebih besar; (2) pilihan produk bermutu lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah untuk konsumen domestik; (3) meningkatkan pendapatan pemerintah dari membebani keuntungan atas investasi asing; (4) manfaat tidak langsung atau ekonomi eksternal dari pengenalan teknologi baru dan lebih maju, pelatihan tenaga kerja lokal, dan stimulus terhadap enterprises domestik melalui hubungan ke depan dan ke belakang. Manfaat tidak langsung atau ekonomi eksternal ini mungkin lebih penting daripada manfaat langsungnya.

Terhadap manfaat ini, private investasi asing langsung memberlakukan beberapa biaya pada negara berkembang penerima. Beberapa biaya ini dapat dihasilkan dari: (1) konsesi khusus yang ditawarkan kepada investor asing seperti pengampunan pajak, (2) efek negatif pada tabungan domestik, (3) kemunduran dalam perdagangan negara berkembang, (4) keseimbangan kesulitan pembayaran, (5) gangguan dalam urusan internal negara berkembang penerima dan kemungkinan mengarahkan program pembangunan bangsa ke arah yang salah.

Adapun pro mengenai kehadiran penanaman modal asing serta peranannya dalam pembangunan menurut Todaro (2006:266,267) yaitu argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan yang baru memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan (faktor-faktor penentu) pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis ini, penanaman modal asing merupakan sesuatu yang sangat positif,

karena hal tersebut dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, cadangan devisa, penerimaan pemerintah, dan keahlian manajerial yang terdapat di negara penerimanya dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan.

Hal yang pertama dan yang paling disebut-sebut sebagai sumbangan positif penanaman modal swasta asing terhadap pembangunan nasional di negara penerimanya (ini jika proses pembangunan diartikan sebagai angka-angka tingkat pertumbuhan *Gross Domestic Product*, yang sekaligus merupakan asumsi konseptual penting yang implisit dalam argumen ini) adalah peranannya dalam mengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan (diinginkan) dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dimobilisasikan. Sumbangan positif yang kedua dari investasi asing, hampir sama dengan yang pertama, yaitu terletak pada peranannya dalam mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan dan jumlah aktual devisa dari pendapatan ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri neto. Kesenjangan ketiga yang dapat diisi oleh modal swasta asing adalah kesenjangan antara target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah pajak aktual yang dapat dikumpulkan. Keempat dan yang terakhir, adalah kesenjangan di bidang manajemen, semangat kewiraswastaan, teknologi produksi dan keterampilan kerja yang diharapkan dapat diisi sebagian maupun seluruhnya oleh perusahaan-perusahaan swasta asing yang beroperasi di negara-negara berkembang yang bersangkutan.

Sedangkan kontra terhadap penanaman modal swasta asing akan memperlebar kesenjangan. Secara umum terdapat dua argumen dasar yang

menentang modal swasta asing, khususnya kegiatan-kegiatan bisnis dari perusahaan multinasional di berbagai negara-negara dunia ketiga. Yang pertama adalah argumen yang semata-mata bersifat ekonomi, sedangkan argumen yang kedua adalah argumen yang lebih bersifat filosofis atau ideologis (Todaro, 2006:268).

### **2.1.6 Pengertian Tenaga Kerja**

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kerja asing menurut pasal ini pada ayat 13 adalah warga negara asing yang memegang devisa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Menurut Djojohadikusumo dalam Baibaba (Salim, 2013) tenaga kerja yaitu semua orang yang sanggup bekerja. golongan ini meliputi mereka mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri, anggota keluarga yang akan menerima upah (uang) seperti mereka yang bekerja untuk menerima gaji dan upah. Golongan tenaga kerja ini juga meliputi mereka yang menganggur, tetapi sesungguhnya mereka bekerja.

Menurut Suparmoko dalam Maharani (2016) Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang

terlibat atau masih berusaha untuk terlibat atau masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku.

Sedangkan menurut Payaman (2007:15), tenaga kerja adalah (*man power*) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja:

- a) Angkatan kerja (*labor force*) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja.
- b) Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dan lain-lain.

Angkatan kerja (*labor force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif atau bisa disebut juga sumber daya manusia. Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu peningkatan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada

kenyataannya jumlah penduduk yang banyak tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan.

Menurut Sadono Sukirno (2008:439) mewujudkan pembangunan memerlukan dua faktor penting: modal dan tenaga ahli. Tersedianya modal saja tidak cukup memodernkan perekonomian. Pelaksanaan pemodernan tersebut harus ada. Dengan kata lain, diperlukan berbagai golongan tenaga kerja-kerja yang terdidik seperti ahli-ahli teknik di berbagai bidang, akuntan dan manajer- untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Disamping itu diperlukan tenaga trampil yang akan menjadi pengawas dan pelaksana dalam berbagai kegiatan industri.

#### **2.1.6.1 Klasifikasi Ketenagakerjaan**

Menurut Payaman (2007: 26), pada dasarnya ketenagakerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yakni tenaga kerja terdidik (*skill labour*), tenaga kerja terlatih (*trainer labour*), tenaga kerja tidak terlatih (*unskill labour*).

##### 1) Tenaga kerja terdidik (*skill labour*)

Tenaga kerja terdidik (*skill labour*) adalah tenaga kerja yang pernah memperoleh pendidikan formal dalam bidang tertentu tapi mereka belum pernah dilatih pada bidang tersebut.

Tenaga kerja terdidik ini diidentikan dengan tenaga kerja yang belum berpengalaman. Keuntungan di dalam memilih tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman ini antara lain:

- a) Tenaga kerja yang belum berpengalaman relatif murah harganya karena tidak mempunyai kekuatan posisi tawar yang tinggi terhadap balas jasa atau upah yang diinginkan.
- b) Tenaga kerja yang belum berpengalaman relatif banyak tersedia di masyarakat sehingga perusahaan akan lebih leluasa memilih tenaga kerja yang dianggap memenuhi persyaratan dan berpotensi untuk bisa ikut memajukan perusahaan.
- c) Tenaga kerja yang belum berpengalaman lebih mudah untuk dibentuk dan diarahkan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Sedangkan kelemahannya diantaranya:

- a) Perusahaan harus merencanakan membuat program pelatihan tertentu kepada tenaga kerja yang belum berpengalaman agar benar-benar terampil dan menguasai bidangnya.
- b) Perusahaan harus rela mengeluarkan sejumlah uang guna membiayai jalannya program pelatihan yang telah direncanakan.
- c) Untuk menjadikan tenaga kerja terdidik menjadi terlatih memerlukan proses waktu yang lama sehingga hasil yang dicapai oleh perusahaan tentu tidak seperti ketika merekrut tenaga kerja terlatih.

## 2) Tenaga kerja terlatih (*trainer labour*)

Yang dimaksud dengan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah bekerja dan pernah mengikuti latihan sesuai bidangnya, misalnya seorang yang telah menamatkan studinya dalam bidang akuntansi, maka mereka dapat digolongkan sebagai tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini dapat disamakan dengan tenaga kerja yang sudah berpengalaman.

Keuntungan dalam memilih tenaga kerja yang sudah berpengalaman ini antara lain:

- a) Tenaga kerja yang sudah berpengalaman mempunyai tingkat produktivitas tinggi sehingga dapat secara langsung memberikan sumbangan yang besar bagi perusahaan.
- b) Tenaga kerja yang sudah berpengalaman ini tidak memerlukan pelatihan khusus dan hanya memerlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sehingga perusahaan tidak perlu membuat program pelatihan seperti yang terjadi pada tenaga kerja yang belum berpengalaman.
- c) Sebagai akibatnya, perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya untuk pelatihan khusus bagi tenaga kerja yang sudah berpengalaman tersebut.

Sedangkan kelemahannya adalah:

- a) Tenaga kerja yang sudah berpengalaman ini pada dasarnya lebih sulit didapat atau diperoleh karena jumlahnya tidak banyak.
- b) Tenaga kerja yang sudah berpengalaman mempunyai daya tawar tinggi terhadap balas jasa atau upah yang diinginkan. Dengan demikian untuk

mendapatkannya perusahaan harus siap memberikan imbalan yang cukup besar.

- c) Tenaga kerja yang sudah berpengalaman pada umumnya sudah terbentuk karakternya dan sudah jadi sehingga jika terjadi ketidaksesuaian dengan keinginan perusahaan biasanya sulit untuk diarahkan atau dibelokkan.

### 3) Tenaga Kerja Tidak Terlatih (*unskill labour*)

Yang dimaksud dengan tenaga kerja tidak terlatih adalah tenaga kerja di luar tenaga kerja terdidik dan juga tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih ini merupakan bagian terbesar dari seluruh tenaga kerja yang ada.

Mereka umumnya hanya mengenyam pendidikan formal pada tataran tingkat bawah dan tidak mempunyai keahlian yang memadai karena memang belum ada pengalaman kerja, sehingga pekerjaan yang dikerjakannya pun umumnya tidak memerlukan keahlian secara spesifik. Misalnya seorang pelajar (tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah, tingkat sekolah lanjutan atas) *drop out*, maka mereka dapat digolongkan pada tenaga kerja tidak terlatih.

Keuntungan di dalam memilih tenaga kerja yang tidak terlatih antara lain:

- a) Tenaga kerja yang tidak terlatih ini sangat murah harganya karena di samping tidak mempunyai pendidikan formal tingkat tinggi juga keterampilan yang dimiliki tidak ada. Dengan demikian posisi kekuatan tawar-menawar menjadi sangat lemah dibanding dengan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih.

- b) Tenaga kerja tidak terlatih ini paling banyak tersedia di masyarakat, bahkan melebihi kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Sehingga perusahaan akan sangat leluasa sekali untuk memilih tenaga kerja yang dianggap benar-benar memenuhi persyaratan dan berkomitmen untuk ikut mengembangkan perusahaan.
- c) Tenaga kerja yang tidak terlatih ini sangat mudah untuk diarahkan sesuai tujuan perusahaan.

Sedangkan kelemahannya adalah:

- a) Tenaga kerja yang tidak terlatih ini dapat menjalankan pekerjaan yang bersifat umum dan tidak memerlukan keahlian.
- b) Tenaga kerja tidak terlatih hanya dapat menjalankan pekerjaan yang bersifat rutin dan umumnya tingkat inisiatif daya kreativitasnya rendah sehingga bila terjadi kendala di lapangan mereka akan merasa kesulitan mencari jalan keluarnya.
- c) Tenaga kerja tidak terlatih ini kurang bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga perlu pengawasan yang lebih teratur dari pihak perusahaan.

#### **2.1.6.2 Penyerapan Tenaga Kerja**

Pada negara yang sedang berkembang umumnya masalah pengangguran merupakan problema yang sulit dipecahkan hingga kini. Karena masalah pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi yang maksimal. Seperti halnya

di negara Indonesia, pemerintah mengupayakan akan berbagai jalan keluar untuk dapat mengatasi pengangguran secara lambat laun baik diperkotaan atau di pedesaan. Pengertian dari penyerapan itu sendiri diartikan cukup luas, menyerap tenaga kerja dalam maknanya menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha untuk dapat sesuai dengan usaha itu sendiri.

Menurut Arsyad (2009:98), dalam ilmu ekonomi seperti yang kita ketahui faktor-faktor produksi adalah tanah, modal, tenaga kerja, *skill* (keahlian). Salah satu faktor tersebut tenaga kerja yang benar sesuai kebutuhan dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki agar tenaga kerja yang dimiliki dalam sektor industri. Modal utama yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia (SDM).

Tenaga kerja yang ada atau lapangan usaha yang ada, tidak mampu menyerap tenaga kerja kondisi yang tidak siap pakai. Disinilah perlunya peranan pemerintah upaya mengatasi melalui pembinaan dan pengembangan industri kecil diharapkan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya dari uraian di atas dijelaskan melalui peningkatan bantuan lunak dan peningkatan bantuan keras dapat meningkatkan motivasi, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan/pandangan yang luas sehingga lebih mempermudah proses penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan. Masalah penyerapan tenaga kerja ini juga tidak terlepas dari kesempatan yang tersedia di tengah-tengah masyarakat.

### **2.1.6.3 Permintaan dan Penawaran Tenaga kerja**

Menurut Makmun dan Yasin (2003) dalam Novita Linda Sitompul (2007), pandangan *mainstream economy* terhadap permintaan tenaga kerja adalah

sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (*derived demand*), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan penjualan atau perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja.

Dengan pertimbangan tersebut (maksimisasi keuntungan), dan dengan asumsi perusahaan beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (*Value Marginal Product of Labor*, VMPL). VMPL menunjukkan tingkat upah maksimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum.

Analisis tradisional terhadap penawaran tenaga kerja sering didasarkan atas mengalokasikan waktunya, yaitu antara waktu kerja dan waktu nonkerja (*leisure*). *Leisure* dalam hal ini meliputi segala kegiatan yang tidak mendatangkan pendapatan secara langsung, seperti istirahat, merawat anak-anak, bersekolah, dan sebagainya. Pilihan tenaga kerja dalam mengalokasikan waktu dari dua jenis kegiatan ini yang akan menempatkan berapa tingkat imbalan (upah) yang diharapkan oleh tenaga kerja. Preferensi subyektif seseorang yang akan menentukan berapa besar jam kerja optimal yang ditawarkan dan tingkat upah yang diharapkan (Tambunan, 2001a dalam Novita Linda Sitompul, 2007).

Ekonom memandang bahwa waktu senggang merupakan kebutuhan pokok manusia, sementara upah juga merupakan barang normal (semakin banyak semakin disukai). Tenaga kerja dianggap tidak suka pada jam bekerja namun suka pada pendapatan dan *leisure*. Oleh karena itu penawaran tenaga kerja berhubungan positif dengan tingkat upah, namun karena *leisure* juga diinginkan oleh tenaga kerja, maka penawaran tenaga kerja bersifat *backward bending* (bengkok ke belakang). Pada tingkat upahnya meningkat karena ingin mempertahankan jam *leisure*-nya (untuk mengurus keluarga dan sebagainya).

### **2.1.7 Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan hal yang bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan topik yang diteliti oleh penulis. Dengan melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan literatur dan referensi pembanding dalam penelitian. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Produksi Perikanan, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan diantaranya:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
1.	M. Zulkarnain, Pudji Purwanti dan Erlinda Indrayani (2013) – Analisis Pengaruh Nilai Produksi Perikanan Budidaya terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Perikanan di Indonesia.	Produksi Sektor Perikanan dan Produk Domestik Bruto sektor Perikanan.	Produksi subsektor Perikanan Budidaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan OLS.</li> <li>• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan budidaya secara bersama-sama mempengaruhi PDB sektor perikanan di Indonesia.</li> <li>• Nilai produksi perikanan sebagian mempengaruhi Produk Domestik Bruto sektor perikanan di Indonesia.</li> </ul>	Jurnal ESCOFIM Volume 1, Nomor 1, tahun 2013.
2.	Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad dan Sabri. Abd. Majid (2016) – Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.	Investasi dan Tenaga Kerja	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan OLS.</li> <li>• Hasil Penelitian ini menunjukkan Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.</li> </ul>	Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 3, Nomor 2, November 2016. ISSN 2442-7411

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
3.	Eunike Elisabeth Bawuno, Josep Bintang Kalangi dan Jacline I. Sumual (2015) – Pengaruh Investasi Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado.	Investasi dan Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan OLS.</li> <li>• Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado.</li> </ul>	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15, Nomor 4 tahun 2015.
4.	Rini Sulistiawati (2012) – Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia.	Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan PAM.</li> <li>• Investasi berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia</li> </ul>	Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Volume 3, Nomor 1, Halaman 29-50, tahun 2012.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
5.	Asri Febriana dan Masyhudi Muqorabbin (2014) – Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya	PMA	Kurs, Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan ECM.</li> <li>• Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung (FDI).</li> <li>• nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (KURS) dalam jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan, dalam jangka panjang KURS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap investasi asing langsung (FDI).</li> </ul>	Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2, Halaman 1009-117, Oktober 2014.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
6.	Rizky P. Lubis, Muhammad Firdaus dan Hendro Sasongko (2015) – Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada sektor Perkebunan di Indonesia.	PMA dan Produk Domestik Bruto.	Kurs, Ekspor, suku bunga domestik, suku bunga Amerika, , Indeks Harga Konsumen, krisis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Vector Error Correction Model.</li> <li>• Hasil menunjukkan pada jangka pendek kurs, ekspor, suku bunga Amerika, PDB dan Indeks Harga Konsumen memiliki dampak positif terhadap PMA.</li> <li>• Pada jangka panjang suku bunga domestik, PDB dan Indeks Harga Konsumen memiliki dampak positif terhadap PMA tetapi krisis memiliki kontribusi negatif terhadap PMA.</li> </ul>	Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume XVI, Nomor 2, Halaman 80-89, tahun 2015, ISSN 1412-3681.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
7.	Muhyina Muin (2017) – Pengaruh Faktor Produksi terhadap Hasil Produksi di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.	Produksi.	Faktor Produksi, Hasil Produksi Merica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan fungsi Cobb Douglas.</li> <li>• Hasil menunjukkan faktor produksi, luas lahan, tenaga kerja, bibit dan pupuk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil produksi merica.</li> <li>• Secara parsial faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil produksi merica adalah luas lahan, tenaga kerja dan pupuk.</li> </ul>	Jurnal Economix Volume 5, Nomor 1, Juni 2017.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
8.	Dewi Ernita, Syamsul Amar dan Efrizal Syofyan (2013) – Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi di Indonesia.	Investasi	Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, Net Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan 2 SLS.</li> <li>• Hasil menunjukkan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia</li> <li>• Secara parsial konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.</li> </ul>	Jurnal Kajian Ekonomi Volume I, Nomor 02, Januari 2013.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
9.	Chairul Nizar, Abubakar Hamzah dan Sofyan Syahnur (2013) – Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.	PMA, PMDN dan Tenaga Kerja	Pertumbuhan Eknomi dan Kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan OLS.</li> <li>• Hasil menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif dan signifikan.</li> <li>• PMA, PMDN dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>	Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1, Nomor 2, Mei 2013.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
10.	Muhammad Hasbul Syafrani, Rusdiah Iskandar dan Irwan Gani (2017) – Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sektor Kehutanan dan Dampaknya terhadap Kesempatan Kerja.	Investasi dan Tenaga kerja.	Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Luas Hutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan OLS.</li> <li>• Hasil menunjukkan tenaga kerja subsektor kehutanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan Kabupaten Berau.</li> <li>• Investasi Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan Kabupaten Berau.</li> </ul>	INOVASI Volume 13, Nomor 2, Halaman 124-134, tahun 2017.
11.	Agus Sulaksono (2015) – Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB sektor Pertambangan di Indonesia	Investasi, Tenaga Kerja dan PDB.	Investasi, Tenaga Kerja dan PDB sektor Pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan OLS</li> <li>• Investasi dan Tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap PDB sektor Pertambangan</li> </ul>	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 20, Nomor 1, April 2015.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
12.	Irene Sarah L., dan Sri Sulasmiyati (2018) – Pengaruh Inflasi, Ekspor dan Tenaga Kerja terhadap PDB (studi pada Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand).	Tenaga Kerja dan PDB.	Inflasi dan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan model <i>fixxed effect</i>.</li> <li>• Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi, ekspor dan tenaga kerja terbukti berpengaruh secara langsung dan simultan terhadap PDB.</li> </ul>	Jurnal Administrasi Bisnis Volume 63, Nomor 1, Oktober 2018.
13.	Dewi Maharani (2016) – Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Sumatera Utara.	Investasi, Tenaga Kerja dan PDB.	PDRB Sumatera Utara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Regresi linier log (<i>fixxed effect</i>).</li> <li>• Menunjukkan bahwa Investasi dan Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB di Sumatera Utara.</li> </ul>	Intiqad Volume 8, Nomor 2, Halaman 32-46, Desember 2016

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
14.	Asya Yandi Dea Kristina (2017) – Pengaruh PAD, IPM dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016.	Tenaga Kerja dan PDB	PAD, IPM dan PDRB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan OLS.</li> <li>• Menunjukkan bahwa PAD, IPM dan Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama.</li> </ul>	Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 1 Jilid 2, Halaman 176- 188, Tahun 2017.
15.	Dedy Syahputra, Abubakar Hamzah dan Muhammad Nasir (2017) – Pengaruh PDB, Suku Bunga Riil dan Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Investasi Swasta di Indonesia.	PDB dan Investasi.	Suku Bunga Riil, Partisipasi Angkatan Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Pendekatan <i>Error Correction Model</i>.</li> <li>• Menunjukkan dalam jangka panjang PDB, Angkatan Kerja dan Suku Bunga Riil memiliki hubungan signifikan baik statistik dan teori dengan tingkat kepercayaan 95%.</li> </ul>	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, ISSN 2502- 6976.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Hasil	Sumber
16.	Evi Safira, Mohd. Nur Syechalad dan Eva Murlida (2018) – Pengaruh PMA, PMDN, Tenaga Kerja dan Luas Lahan sektor Pertanian terhadap PDRB sektor Pertanian di Provinsi Aceh.	PMA, PMDN, Tenaga Kerja dan PDB.	Luas Lahan sektor Pertanian dan PDRB sektor Pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan OLS.</li> <li>• Menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh positif dan Luas Lahan berpengaruh negatif terhadap PDRB sektor Pertanian.</li> <li>• PMA dan Tenaga Kerja Tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor Pertanian di Provinsi Aceh</li> </ul>	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 4, Nomor 1, Maret 2018, ISSN 2502-6976.
17.	Ahmad Jazuli Rahman (2016) – Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2014.	Investasi, Tenaga Kerja dan PDB.	Pengeluaran Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan Regresi Data Panel.</li> <li>• Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Investasi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB Banten.</li> </ul>	Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14, Nomor 02, Desember 2016.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini bekerja dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

### **2.2.1 Hubungan Produksi Perikanan terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan**

Menurut teori Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Secara kajian empiris menunjukkan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. (Sukirno, 2016:437).

Sehingga hubungan produksi perikanan adalah positif terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan. Jika produksi perikanan naik, maka akan meningkatkan Produk Domestik Bruto sektor Perikanan.

### **2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan**

Menurut teori Schumpeter, adanya tekanan terhadap pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu

barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan menimbulkan investasi baru.

Investasi baru akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat akan bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong banyak perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak dan penanaman modal baru. (Sukirno, 2016:433).

Sehingga, hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Produk Domestik Bruto sektor Perikanan adalah positif. Jika Penanaman Modal Dalam Negeri naik maka Produk Domestik Bruto sektor Perikanan pun naik.

### **2.2.3 Hubungan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan**

Hubungan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Produk Domestik Bruto sektor Perikanan adalah positif. Sama halnya dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing pun merupakan salah satu jenis dari investasi atau penanaman modal. Menurut analisis teori neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan yang baru, penanaman modal asing merupakan sesuatu yang sangat positif, karena Penanaman Modal Asing tersebut sebagai sumbangan positif terhadap pembangunan nasional di negara penerimanya (ini jika proses

pembangunan diartikan sebagai angka-angka tingkat pertumbuhan GDP, yang sekaligus merupakan asumsi konseptual penting yang implisit).

#### **2.2.4 Hubungan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan**

Tenaga kerja dipandang sebagai salah satu faktor produksi untuk meningkatkan daya guna faktor faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan modal, dsb.) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan kepada karyawannya sebagai wujud kapitalisasi tenaga kerja. Perubahan kuantitas tenaga kerja akan berpengaruh pada pada tingkat produksi karena tenaga kerja merupakan salah satu komponen dari faktor produksi. Bila kuantitas tenaga kerja meningkat, maka hasil produksi (Produk Domestik Bruto sektor perikanan) akan meningkat pula.

#### **2.2.5 Hubungan Produksi Perikanan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan**

Produksi adalah setiap kegiatan yang dapat meningkatkan *utility* (nilai guna) suatu barang. Salah satu bentuk kegiatan produksi diantaranya kegiatan mengubah bentuk dari suatu barang maupun memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. (Lia Amaliawati, 2012:165).

Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing merupakan bentuk dari investasi yang merupakan faktor produksi. Menurut

Sukirno (2016:121) investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen dari faktor produksi yang juga akan mempengaruhi tingkat produksi. Jumlah tenaga kerja yang terus tumbuh dapat disertai dengan investasi yang menunjang dalam menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memicu laju Produk Domestik Bruto sebagai akibat indikator pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tujuan pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja dan dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan investasi dalam kaitannya dengan jumlah tenaga kerja dan investasi. Menurut Silalahi (2008), penciptaan kesempatan kerja produktif dapat dilakukan dalam bentuk investasi, sehingga lebih banyak memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja.

Cobb-Douglas mengemukakan tentang teori fungsi produksi yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja dalam menaikkan output atau produksi. Fungsi produksi Cobb-Douglas ( $Y = f(K, L)$ ) menunjukkan bahwa total output dipengaruhi oleh modal input dan tenaga kerja input.

Dari uraian di atas, terlihat hubungan antara Produksi Perikanan, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan. Yang kemudian dikuatkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad

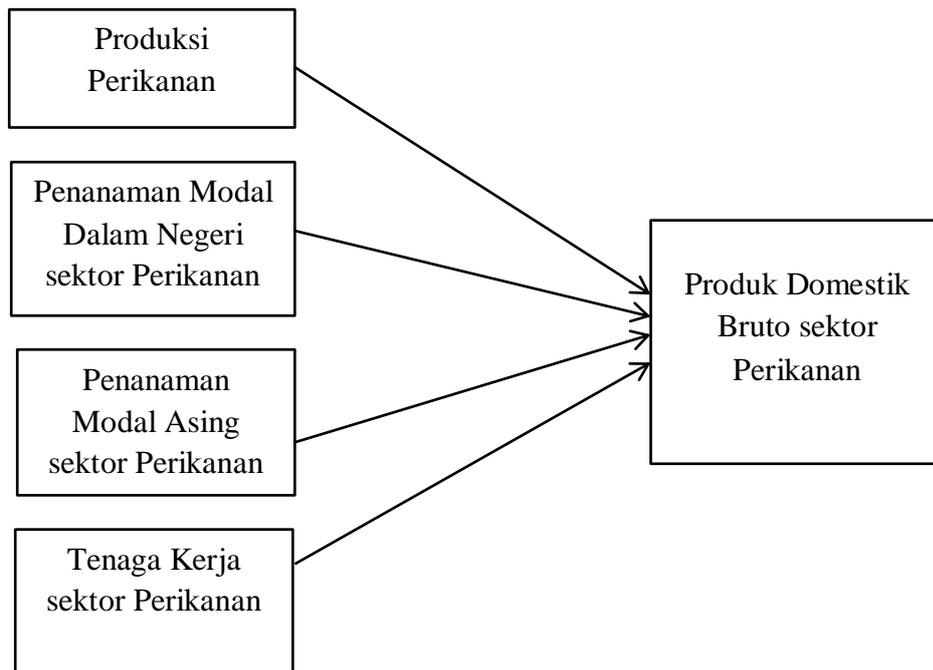
dan Sabri. Abd. Majid dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel Investasi memiliki hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Kemudian dikuatkan lagi oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Maharani dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sumatera Utara”. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa Investasi dan Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sumatera Utara.

Kemudian dikuatkan lagi oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Zulkarnain, Pudji Purwanti dan Erlinda Indrayani dengan judul “Analisis Pengaruh Nilai Produksi Perikanan Budidaya terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan di Indonesia”. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa Nilai Produksi Perikanan Budidaya memiliki hubungan positif terhadap Produk Domestik Bruto.

Dari kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Produksi Perikanan, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja dapat mempengaruhi Produk Domestik Bruto Sektor Perikanan baik secara parsial maupun bersama-sama.

Agar terlihat jelas arah dari pemikiran penulis, perlu disusun suatu kerangka pemikiran sebagai dasar yang dipakai untuk menganalisis data:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut:

1. Diduga Produksi Perikanan, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan Indonesia secara parsial.
2. Diduga Produksi Perikanan, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto sektor Perikanan Indonesia secara bersama-sama.